



Dugaan Korupsi di Desa Satra Jaksa akan Periksa Pelaksana Proyek

SEMARAPURA, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa di Desa Satra, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, terus bergulir. Dalam sebulan ini petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung sudah memeriksa 7 orang terkait kasus tersebut, termasuk Perbekel Desa Satra, Ni Made Ratnadi belum lama ini.

Setelah memeriksa pihak pengelola anggaran di Desa Satra, Kejari akan memanggil pihak kontraktor penggarap proyek pembangunan di Desa Satra. "Kita terus kembangkan kasus ini, dalam waktu dekat ini kita akan minta keterangan kepada pelaksana proyeknya," ujar Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Meyer Simanjuntak kepada *NusaBali*, Selasa (7/1).

Kata dia, setelah semua informasi dan data yang diperlukan rampung, maka pihaknya baru bisa menarik kesimpulan terhadap kasus tersebut. "Apakah ada indikasi penyimpangan pengelolaan dana atau tidak, nanti baru bisa kita simpulkan," kata pria yang baru menjabat sejak seminggu ini.

Sebelumnya, kasus ini mulai digeber setelah Kejari Klungkung menerima surat kaleng per 26 Desember 2015 mengatasnamakan

kelompok masyarakat anti korupsi Desa Satra. Dalam surat itu meny-
orot beberapa hal terkait pemban-

gunan di Desa Satra, yakni proses pemav-
ingan tidak pernah
ada sosialisasi, ban-
tuan desa jumlahnya
miliaran namun ti-
dak ada rapat sos-
ialisasi kepada ma-
syarakat, termasuk
pembangunan ban-
tuan bedah rumah
yang dinilai kurang
transparan.



Meyer Simanjuntak

Sementara, Per-
bekel Desa Satra, Ni Made Ratna-
di membantah tuduhan terkait
surat kaleng yang dilayangkan
ke Kejari Klungkung dan instansi
terkait lainnya. Bahkan dia me-
minta supaya yang membuat
surat kaleng tersebut memberi-
kan data dan membeber fakta
kerugian yang dimaksud. "Ini
merupakan tindakan pengecut,"
ujarnya beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, dia tidak
akan terlalu mempersoalkannya,
apalagi sampai membawa ke
ranah hukum. Orang yang me-
layangkan surat kaleng tersebut,
kata dia hak dari yang bersang-
kutan. Sebab, sesuai dengan
tujuan awalnya, ibu yang sudah
dikarunia empat orang anak ini
ingin mensejahterakan masyara-
katnya. "Kami selama ini sudah
berusaha untuk membangun
desa," ujarnya. **wa**



RS Nyitdah Kediri Masih Minim Alat Kesehatan

TABANAN, NusaBali

Komisi IV DPRD Tabanan menggelar inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Nyitdah di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan, Selasa (7/2). Salah satu sasaran sidak yakni pembangunan poliklinik dan rawat inap lantai III dengan anggaran dana APBD Tabanan sebesar Rp 30 miliar. Komisi IV pun mendesak pembangunan poliklinik dan ruang rawat inap itu segera dirampungkan dan difungsikan. Terungkap, dalam sidak tersebut, RS Nyitdah juga kekurangan alat kesehatan karena telah ditarik oleh BRSUD Tabanan.

Sidak Komisi IV DPRD Tabanan dipimpin Ketua I Made Dirga serta anggotanya Ni Made Meliani dan I Gusti Komang Wastana. Mereka juga didampingi dua staf ahli yakni I Nyoman Sudarma dan Wayan Gunadi. Rombongan Komisi IV DPRD Tabanan diterima Direktur UPT RS Nyitdah, dr Nyoman Wisma Brata. Rombongan Komisi IV ini juga diajak langsung meninjau poliklinik lantai III yang baru dibangun. Poliklinik ini baru finishing di lantai III saja yang nantinya difungsikan untuk rawat inap. "Kami mendesak Pemkab Tabanan untuk segera merampungkan dan fungsikan poliklinik ini," pinta Dirga.

Menurut Dirga, saat ini BRSUD Tabanan kewalahan menangani pasien karena sering kekurangan bed (tempat tidur). Sehingga dengan pembangunan poliklinik dan rawat inap



Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga (dua dari kiri) saat minta keterangan dari Direktur UPT RS Nyitdah, dr Nyoman Wisma Brata saat menggelar sidak ke RS Nyitdah, Kediri, Tabanan, Selasa (7/2). • NUSABALI/SUGIANTO

UPT RS Nyitdah ini pelayanan kesehatan lebih maksimal. Dikatakan, kelanjutan pembangunan poliklinik lantai III ini rencana dengan dana pinjaman sebesar Rp 150 miliar. Rencananya Provinsi Bali juga akan bantu kurkan dana. Diharapkan pula pemerintah pusat melalui pola pembangunan semesta berencana juga saluran bantuan. "Pemkab Tabanan punya target pindahkan BRSUD Tabanan ke Nyitdah pada tahun 2020," ungkap Dirga.

Menurut mantan Ketua Fraksi PDIP Tabanan ini, UPT RS Nyitdah juga kekurangan alat-alat kesehatan. Sebab alat-alat kes-

ehatan yang dulunya ditempatkan BRSUD Tabanan telah ditarik. "Bagaimana rumah sakit bisa bekerja tanpa prasarana. Kami mohonkan segera disikapi oleh Pemkab Tabanan," tandas Dirga. Sementara Direktur UPT RS Nyitdah, dr Nyoman Wisma Brata mengatakan, pengadaan alat kesehatan yang paling mendesak yakni alat-alat laboratorium dan rontgen. dr Wisma Brata mengaku sudah dapat kabar dari Bagian Keuangan Dinas Kesehatan sudah bisa belanja pada tri wulan pertama dengan kurun dana sebesar Rp 10 miliar.

Hanya saja kurun dana Rp 10 miliar itu tak dikhususkan

untuk beli alat-alat kesehatan saja. Namun pahalannya juga untuk meubeler, perawatan gedung, ambulans, dan operasional. Selain alat-alat laboratorium dan rontgen, prioritas pengadaan mesin anastesi agar ruang operasi bisa difungsikan. "Kami yakin di tri wulan pertama ini alat-alat laboratorium dan rontgen sudah terpenuhi," tandas dr Wisma Brata. Sementara untuk alat yang lebih besar seperti mesin MRI diupayakan pada APBD Perubahan. Dikatakan, saat ini di UPT RS Nyitdah sudah ada 35 bed hingga di UGD. **k21**